

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah memerlukan kemampuan mengantisipasi ancaman. Kemampuan mengantisipasi ancaman, dengan melakukan kegiatan deteksi dini dan peringatan dini merupakan ranah intelijen. Dalam rangka penyelenggaraan deteksi dini dan peringatan dini di daerah tersebut perlu didukung dengan koordinasi yang baik antar aparat unsur intelijen secara profesional.

Untuk mensinergikan unsur-unsur intelijen serta meningkatkan komunikasi dan koordinasi intelijen, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah (Kominda).

Kominda (Komunitas Intelijen Daerah) melibatkan BIN (Badan Intelijen Negara), intelijen TNI (Tentara Nasional Indonesia), intelijen Polri (Polisi Republik Indonesia), intelijen Kejaksaan, dan unsur-unsur yang lain seperti Bakesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik), Imigrasi dan Bea Cukai. Kominda harus bisa melakukan deteksi dini agar mengetahui segala apa yang ada dan apa yang terjadi di setiap jengkal wilayah yang menjadi tanggungjawabnya berikut segala perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat serta perkembangannya.

Selanjutnya mengidentifikasi tantangan yang tengah dan akan dihadapi, kemudian memberikan peringatan dini sebagai pengetahuan dasar dan arah perumusan kebijaksanaan yang bersifat antisipatif atau pengambilan keputusan dan tindakan dengan resiko yang telah diperhitungkan (Hamardiyono: 2012). Berdasarkan regulasi yang mendasarinya terdapat dua elemen penting pada eksistensi Kominda yaitu fungsi koordinasi dan pencegahan terhadap ATHG. Secara rutin, koordinasi dilakukan Kominda untuk membahas isu-isu penting yang terjadi di daerah. Hasil dari rapat koordinasi menjadi bahan rekomendasi bagi kepala daerah untuk merumuskan kebijakan terkait stabilitas daerah. (Armawi: 2015).

Pembentukan Kominda juga dalam rangka menyikapi perkembangan situasi nasional yang semakin mengkhawatirkan dan ditandai dengan maraknya aksi teror di berbagai tempat, pemerintah memandang perlu mengambil langkah-langkah nyata, khususnya guna mengkoordinasikan unit-unit intelijen dari berbagai lembaga yang ada sehingga dapat dilakukan deteksi dini, peringatan dini atas Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) terhadap stabilitas nasional dapat segera dicegah (Haryata: 2013).

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah, pada 7 Mei 2012, Bupati Bangkalan membentuk Susunan Dewan Pembina Dan Susunan Keanggotaan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kabupaten Bangkalan Tahun 2012. Dalam keputusan Bupati Bangkalan tersebut juga dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Deteksi Dini Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) yang beranggotakan 48 orang yang

berasal dari Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Bangkalan, BIN, Kodim (Komando Distrik Militer) Bangkalan, Lanal (Pangkalan Angkatan Laut) Batuporon, Polres (Kepolisian Resor) Bangkalan dan Kejari (Kejaksaan Negeri Bangkalan) Bangkalan.

Keberadaan Kominda Bangkalan sebagai sebuah instrumen merupakan kolaborasi antara kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menciptakan stabilitas nasional di daerah. Kominda Bangkalan merupakan forum komunikasi dan koordinasi antara unsur intelijen yang ada di Bangkalan, dalam melaksanakan deteksi dan cegah dini terhadap berbagai potensi ATHG yang ada di Bangkalan sebagai bagian dari kewaspadaan nasional di daerah. Kolaborasi yang sinergis melalui komunikasi dan koordinasi antara komunitas intelijen dengan kepala daerah dalam Kominda adalah sebuah kekuatan dan solusi yang mampu berperan dalam mencari dan menjawab solusi atas permasalahan di daerah, yang bersumber dari pusat maupun dari daerah.

Dalam perkembangannya fungsi intelijen yang dilakukan oleh Kominda saat ini baru pada tahap sebatas aktivitas intelijen, yaitu penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Kegiatan operasi intelijen belum pernah dilaksanakan oleh Kominda. Dalam melaksanakan kegiatan intelijen berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan, ternyata tidak semua anggota Kominda melakukannya. Satuan yang terlibat hanyalah satuan yang memiliki anggota intelijen. Hal ini terbatas pada intelijen Kodim, intelijen Kepolisian, Posda BIN, Anggota Den Intel Kodam, sedangkan anggota lainnya hanya sebagai badan pengumpul keterangan (Bayu: 2015).

Koordinasi dan komunikasi yang dilakukan Kominda Bangkalan merupakan faktor sangat penting dalam menghimpun informasi. Koordinasi dan komunikasi yang dilakukan Kominda Bangkalan berfungsi untuk memelihara hubungan baik dalam berbagai kegiatan. Dalam perkembangannya Kominda Bangkalan mengalami hambatan ketika melakukan komunikasi dan koordinasi, sehingga kinerja Kominda Bangkalan kurang maksimal. Kondisi tersebut dipengaruhi anggota Kominda Bangkalan sebagian besar berlatarbelakang non intelijen, dan tidak mempunyai kualifikasi intelijen. Sehingga anggota Kominda Bangkalan yang berlatarbelakang non intelijen tidak mempunyai kompetensi di bidang intelijen dan mempengaruhi kinerja Kominda Bangkalan.

Menurut Spenser dan Spenser dalam Moeheriono (2012) kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang yang berkaitan dengan efektifitas kinerja individu yang memiliki hubungan kausal atau sebagai sebab akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior ditempat kerja atau pada situasi tertentu. Sementara itu, Spencer dan Spencer dalam Sutrisno (2011) mengemukakan karakteristik kompetensi terdapat lima aspek yang meliputi *motives*, adalah sesuatu dimana seseorang secara konsisten berpikir sehingga ia melakukan tindakan. *Traits* adalah watak yang membuat orang untuk berperilaku atau bagaimana seseorang merespons sesuatu dengan cara tertentu. *Self concept* adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang. *Knowledge* adalah informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu serta *skills* adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu baik secara fisik maupun mental.

Pernyataan di atas mengandung makna bahwa kompetensi adalah karakteristik seseorang yang berkaitan dengan kinerja efektif dan atau unggul dalam situasi pekerjaan tertentu. Kompetensi dikatakan sebagai karakteristik dasar karena karakteristik individu merupakan bagian yang mendalam dan melekat pada kepribadian seseorang yang dapat dipergunakan untuk memprediksi berbagai situasi pekerjaan tertentu. Kemudian kompetensi juga berkaitan antara perilaku dan kinerja karena kompetensi menyebabkan atau dapat memprediksi perilaku dan kinerja.

Menurut Mangkunegara (2009) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah faktor kemampuan yang secara psikologis kemampuan pegawai terdiri dari kemampuan potensi dan kemampuan. Artinya pegawai yang memiliki kemampuan di atas rata-rata dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan. Kemudian motivasi yang terbentuk dari sikap seorang pegawai dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurut Gibson dalam Notoatmodjo (2009) faktor-faktor yang menentukan kinerja seseorang dikelompokkan menjadi 3 faktor utama:

1. Variabel individu, yang terdiri dari: pemahaman terhadap pekerjaan, pengalaman kerja, latar belakang keluarga, tingkat sosial ekonomi dan faktor demografi (umur, jenis kelamin, etnis, dan sebagainya).
2. Variabel organisasi, yang antara lain terdiri dari: kepemimpinan desain pekerjaan, sumber daya yang lain, struktur organisasi dan sbagainya.

3. Variabel psikologis, yang terdiri dari persepsi terhadap pekerjaan, sikap terhadap pekerjaan, motivasi, kepribadian dan sebagainya.

Dengan demikian kinerja adalah pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Sehingga kinerja merupakan sebuah proses formal untuk melakukan peninjauan kembali dan evaluasi seseorang secara periodik. Kinerja ditujukan untuk pengembangan hasil kerja karyawan dalam sebuah organisasi dengan dimensinya kualitas kerja, kepuasan kerja dan kepribadian.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut serta untuk memberikan sumbangsih pemikiran bagi Kominda Bangkalan, maka penulis mengambil judul tesis Pola Diklat Pengembangan Kompetensi Aparat Intelijen Untuk Meningkatkan Kinerja Kominda (Studi Fenomenologi Pada Komunitas Intelijen Daerah Bangkalan).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diteliti adalah:

- a. Bagaimana pola Diklat Intelijen yang telah ditempuh anggota Kominda Bangkalan.
- b. Bagaimana kompetensi anggota Kominda Bangkalan.
- c. Bagaimana kinerja anggota Kominda Bangkalan

1.3 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui kompetensi dan kinerja aparat intelijen yang ditempatkan di Kominda Bangkalan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kinerja anggota Kominda Bangkalan tidak maksimal.
3. Untuk mengetahui pola Diklat intelijen anggota Kominda Bangkalan dan kendala pelaksanaan pola Diklat intelijen bagi anggota non intelijen.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian:

1. Bagi peneliti dan akademisi, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik atas teori yang diperoleh selama perkuliahan, khususnya mengenai kompetensi dan kinerja aparat intelijen dalam melaksanakan fungsi intelijen serta faktor-faktor yang menyebabkan kinerja anggota Kominda Bangkalan tidak maksimal.
2. Bagi Kominda Bangkalan, penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan dan masukan bagi Kominda Bangkalan, untuk mengembangkan pola Diklat bagi anggota Kominda Bangkalan yang non intelijen.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini terbatas pada pola Diklat intelijen untuk mengembangkan kompetensi aparat intelijen dan untuk meningkatkan kinerja Kominda Bangkalan.